

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Literatur, dan Referensi Lainnya.

- Bandiyono, A., & Ustadnia, M. (2018). Mekanisme Pengadaan Barang Operasional dengan Metode Pengadaan Langsung. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 8(2).
- Danang, S. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Graha Ilmu.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Ervianto, W. I. (2002). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi.
- Karaini, A. A. (1994). *Pengantar Manajemen Proyek*. Erlangga.
- Lubis, A. S. (2011). *Tinjauan Hukum Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Oleh : Abu Samman Lubis*.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pujawan, I., & Mahendrawari, E. (2010). *Supply Chain Management (Edisi Kedu)*. Guna Widya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutarman. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Logistik*. PT Refika Aditama.
- Tomalili, R., Tatawu, G., & Sensus, L. (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 111–122.
- Watupongoh, N. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kontraktor Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Adpel Bitung. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 1–12.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Kementerian Keuangan RI. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan No. 188 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.*

Kementerian Keuangan RI. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan*

Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah RI. 2018. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah RI. 2018. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.*